

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Chidir, 1987, *Badan Hukum*, Alumni, Jakarta.
- Dwi Anggono, Bayu, *et al.*, 2021, *BPJS Ketenagakerjaan Aspek Politik Hukum, Kelembagaan, Aset dan Kepesertaan*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Eka Putri, Asih & Mahendra, Oka, 2013, *Transformasi Setengah Hati Persero*, Pustaka Martabat, Tangerang Selatan.
- Farida, Ike, 2013, *Perjanjian Perburuhan Pekerjaan waktu Tertentu dan Outsourcing*, Badan Penerbit FHUI, Jakarta,
- Hartono, Judiantoro, 1992, *Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perpekerjaan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hernoko, Agus Yudha 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Idris, Fahmi, 2018, *Dinamika Hubungan Industrial*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta.
- Kansil, CST, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Balai Pustaka, Jakarta.
- Lamijan, Jamal Wiwoho, 2021, *Upah Kerja dan Keadilan*, Pena Persada, Jawa Tengah.
- Marnisah, Luis, 2019, *“Hubungan Industrial dan Kompensasi”* Deepublish, Sleman.
- Pangaribuan, Juanda, 2017, *Seluk Beluk Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial*, MISI, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Haniatjo, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Shamad, Yunus, 1999, *Hubungan Industrial di Indonesia*, PT Bina Sumberdaya Manusia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

- Suparji, 2015, *Transformasi Badan Hukum di Indonesia*, UAI Press, Jakarta.
- Sumardjono, Maria, 2019, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Soepomo, Imam 2001, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Industrial*, Pradnya Paramita, Bandung.
- Uwiyono, Aloysius Uwiyono, 2020, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Vijayantera, Wayan Agus dan I Nyoman Jaya Kesuma, 2022, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Universitas Mahasaraswati Press, Denpasar.
- Wijayanti Asri, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainuddin, Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Artikel Jurnal

- Bastian Jimmy, Hadi Syofyan, Badan Hukum Publik Sebagai Justitiabelen Dalam Peradilan Tata Usaha Negara, *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 17, Nomor 2*, Agustus 2021.
- Budiono, Abdul Rachmad, Makna “Perintah” Sebagai Salah Satu Unsur Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, “*Arena Hukum*”, *Volume 6, Nomor 2*, Agustus 2012.
- Charda, Ujang, Telaah Kritis Terhadap Inkonsistensi Konsep Hubungan Kerja Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, *Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 33, No. 2*, September 2015.
- Hernawan, Ari, Hukum Dan Kekuasaan Dalam Hubungan Industrial, *Mimbar Hukum Edisi Khusus*, November 2011.
- Hendrik Mezay, Meray, Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum, *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3*, Maret 2026.
- Kahpi, Ashabul, Tinjauan terhadap permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia, “*Jurisprudentie*”, *Volume 5, Nomor 2*, Desember 2018.
- Khoe, Fenny Natalia, Hak Pekerja Yang Sudah Bekerja Namun Belum Menandatangani Perjanjian Kerja Atas Upah Ditinjau Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, “*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*”, Vol.2 No.1, September 2013.

Kuahaty, Sarah S, Pemerintah Sebagai Subjek Hukum Perdata Dalam Kontrak Pengadaan Barang Atau Jasa, *Jurnal Sasi*, Vol. 17, No. 3, Juli-September 2011.

Mezay, Meray Hendrik, Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum, “*Law Review*” *Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. V, No.3, Maret 2006.

Mashudi, Nofianto Hari, Asas Kebebasan berkontrak Pada Perjanjian kerja Berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undangketenagakerjaan, “*Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*”, Volume 11 Nomor 1, Juni 2022.

Mirwan, *et al*, Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Pupuk Iskandar Muda, “*Jurnal Ilmu Hukum*”, ISSN 2302-0180 *Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* Volume 3, No. 2, Mei 2015.

Nurhayati, Yati, *et al*, Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Volume 2, Issue 1, Februari 2021.

Priyono, Ery Agus dan Katya Nabila Saka Birauti, Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Praktek Pembuatan Perjanjian Kerja Perancangan, *Law, Development & Justice Review*, Volume 5, Number 1, Mei 2022.

Hutomo, Markus Marselino Soge, Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer, *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan* Vol 1 No 1 –Maret 2021, hlm.52.

Rumimpunu, Fritje, Sistem Hubungan Industrial Pancasila di Indonesia Dengan Tenaga Kerja, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. II, No. 2, Januari-Maret 2014.

Rumimpunu, Fritje, 2014, Sistem Hubungan Industrial Pancasila di Indonesia Dengan Tenaga Kerja, Perusahaan Dilihat Dari Aspek (Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, “*Jurnal Hukum Unsrat*”, Vol II/No. 2, Januari-Maret 2014.

Rusdi, *et al*, Analisis Yuridis Penghentian Penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, April 2020.

- Santosa, A.A. Gede D. H, Perbedaan Badan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha Vol 5, No 2*.
- Sonata, Depri Liber, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8, No. 1*, Januari - Maret 2014.
- Sinaga, Niru Anita, Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian, *Binamulia Hukum, Vol. 7, No. 2*, Desember 2018.
- Syah, A. Sakti Ramdhon Syah, Rechtspositie Badan Hukum Privat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, *Justisi Vol.6, No.1, 1-10*.
- Taufik, Ade Irawan, Putusan Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, *Rechtsvinding, Volume 9 Nomor 3*, Desember 2020.
- Wijayanta, Tata dan Ari Hernawan, Studi Evaluatif Peran Hakim Ad Hoc Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta, *Yustisia, Vol. 3, No. 1* Januari - April 2014.
- Yunarko, Bambang, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Lembaga Arbitrase Hubungan Industrial, *"PERSPEKTIF", Volume XVI, No. 1* Tahun 2011 Edisi Januari, 2011.
- Zulkarnaen, Ahmad Hunaeni, Masalah Rawan Dalam Hubungan Industrial Dan Konsep Negara Kesejahteraan Indonesia, *"Jurnal Mimbar Justitia", Vol. II No. 02 Edisi Juli-Desember 2016*.

C. Karya Ilmiah

- Aulia, Frida, *Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang Memenangkan Pekerja Mangkir Dalam Perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pekerja The Oxalis Hotel Regency Magelang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Putusan Pengadilan Nomor 76/PDT.SUS-PHI/G/2016/SMG)*, 2020.
- Lazuardi, Muhammad Ardhymas, Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) Dari Peradilan Umum ke Peradilan Tata Usaha Negara Ditinjau Berdasarkan Asas Keadilan, Asas Kepastian Hukum dan Asas Kemanfaatan, 2019.
- Munir, Misbahul, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Juni 2007.

Rizqia, Galuh Praharafi, Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana bagi Badan Hukum Publik terhadap Korban Tindak Pidana Badan Hukum Publik, Juli 2013.

Sasmito, Danang, Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Mediasi dan Dampaknya Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Januari 2020.

D. Internet

Anam, Saiful & partners, Perbandingan Yuridis Kedudukan Negara Sebagai Badan Hukum Publik Dan Negara Sebagai Pemegang Saham Suatu Perseroan, www.saplaw.top, diakses tanggal 31 Mei 2022.

Anonim, Pembagian Badan Hukum / Korporasi, <https://123dok.com/article/pembagian-badan-hukum-korporasi-buku-hukum-korporasi-amalia.zlg4m06o>, diakses pada tanggal 15 Januari 2023.

Anonim, Hukum Perdata Menurut Ahli, <http://umsu.ac.id>, diakses tanggal 17 Januari 2023.

Anonim, 4 Syarat Sah Perjanjian di Mata Hukum, www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 6 September 2022.

Anonim, Pengertian Upah Menurut Para Ahli Ekonomi, <https://www.kompasiana.com>, diakses tanggal 5 Oktober 2021.

Anonim, Metamorfosis Badan Hukum Indonesia, www.hukumonline.com, diakses tanggal 29 Oktober 2022.

BAB XIV Pasal 33 dan 34 UUD NRI Tahun 1945 Setelah Perubahan, https://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945_Pemubahan.pdf, diakses pada tanggal 7 April 2022.

Febryana, et al, Peran Dan Fungsi Pemerintah Dalam Hubungan Industrial, Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, <https://ojs.unud.ac.id>, diakses tanggal 14 Agustus 2022.

Gumanti, Retna, Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHperdata), <https://ejurnal.ung.ac.id>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2022.

Hasanah, Sovia Hasanah, Pengertian Atribusi, Delegasi dan Mandat, www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 13 Agustus 2022.

Ilyas, Adam, Menggali Perlindungan Hukum dalam Hukum Administrasi Negara, <https://www.researchgate.net/publication/341110297>, diakses tanggal 27 Januari 2023.

Sovia Hasanah, Perbedaan Konsiliasi dengan Arbitrase dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, www.hukumonline.com, diakses tanggal 29 Oktober 2022.

Syafnidawaty, Data Sekunder, www.raharja.ac.id, diakses pada tanggal 22 Agustus 2022.

Tunardy, Wibowo, Pengertian badan hukum, www.jurnalhukum.com, diakses tanggal 7 Agustus 2022.

Wijayanti, Asri, Menggugat Konsep Hubungan Kerja, <http://repository.um-surabaya.ac.id/>, diakses pada tanggal 9 oktober 2022.

<https://kbbi.web.id/kerja>, diakses tanggal 3 Oktober 2022 pukul 20.30 WIB.

E. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380).

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Tindakan pemerintahan dan Kewenangan mengadili Perbuatan melanggar hukum Oleh Badan dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

F. Putusan Pengadilan

Putusan Perkara 130/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg antara Maman Miraz S lawan BPJS Ketenagakerjaan.

G. Daftar Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan responden Dani Anjar Penata Deputy Direktur Bidang Human Capital melalui *google form* ada tanggal 1 Desember 2022.

Hasil wawancara dengan narasumber Basani Situmorang di Deputy Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum pada tanggal 16 November 2022 di Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan.

Hasil wawancara dengan responden Indah Hatiningrum Penata Deputy Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Desember 2022.

Hasil wawancara dengan responden Hawijoyo Nadeak Kuasa Hukum BPJS Ketenagakerjaan melalui *google form* pada tanggal 19 Desember 2022.